
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan Optimalisasi *Evidence Based Policy* Kasus Penurunan Kemiskinan

Noor Rizky Tiara Putri^{1*}, Najua Febrian Rachmawati², Abinaya Fikri Nayotama³, Prianda Defri Harmansyah⁴

^{1*} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis noorizkytara@student.uns.ac.id

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis najuafebranr@student.uns.ac.id

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis abinayafikri@student.uns.ac.id

⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis priandadefri10@student.uns.ac.id

Abstrak: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang dapat dikategorikan kronis dan tidak pernah berakhir. Pembangunan manusia yang dinamis menambah kompleksitas kemiskinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka musyawarah perencanaan pembangunan hadir sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyuarakan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencari bukti yang dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Kata Kunci: *evidence based policy*; kemiskinan; musyawarah perencanaan pembangunan

Abstrak: Poverty is one of the problems in Indonesia that can be categorized as chronic and never ending. Dynamic human development adds to the complexity of poverty. To answer these problems, development planning meetings exist as a forum for community aspirations in voicing problems. This study uses a qualitative descriptive method with a literature review approach. The results of the study show that deliberations on development planning are one of the ways to find evidence that is used as the basis for making evidence-based policies.

Keywords: Development Planning Conference; Evidence Based Policy, Poverty

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu utama yang dihadapi dan ingin segera diselesaikan oleh seluruh negara di dunia oleh semua negara di dunia termasuk negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), di Tahun 2022 Indonesia memiliki presentase penduduk miskin sebesar 9,57 persen atau sebesar 26,36 juta jiwa Hal ini menjadi sebuah ironi ketika melimpahnya sumber daya alam di Indonesia tidak termanfaatkan secara maksimal untuk mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan diidentifikasi tidak hanya sebagai ketidakmampuan terhadap aspek ekonomi, namun lebih luas lagi kepada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan diluar pendapatannya; aspek sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik. Masyarakat miskin pada umumnya didefinisikan sebagai kelompok yang lemah

dalam status sosial, terbatasnya kemampuan untuk berusaha, serta minimnya akses kepada kebutuhan ekonomi, yang membuatnya akan semakin tertinggal dari kelompok lain dengan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Saat ini kemiskinan seringkali diukur secara absolut unidimensional, berdasarkan pendekatan tingkat pendapatan atau pengeluaran dan konsumsi. Pendekatan Ini dinilai kurang komprehensif dalam mendefinisikan kemiskinan dikarenakan kompleksitas masalah yang terjadi tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan atau pengeluaran (Prakarsa, 2020). Kesalahan pendefinisian atau yang disebut dengan "*The Third Error Type*" ini berimbas pada kurangnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Senada dengan hal ini, Suryawati (2005) memberikan pernyataan bahwasannya pembangunan yang ada pada saat ini belum dapat mengurangi jumlah penduduk di seluruh dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Dalam menangani masalah yang terjadi, tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sebab akibat, namun lebih mendalam lagi juga melibatkan nilai dan preferensi.

Pada spektrum yang lain, kemiskinan juga dapat dilihat dari pendekatan bersifat relative yang didasarkan pada perbandingan relative tingkat kesejahteraan antar penduduk. Secara garis besar pendekatan ini melihat ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pendekatan relatif secara vertikal umumnya diukur dengan indeks rasio gini, dimana pada tahun 2022 Indonesia mencatatkan angka 0,381, dengan rincian pada daerah perkotaan 0,402 dan pada daerah pedesaan 0,313 (BPS, 2023). Sementara data World Bank (2023) menunjukkan angka 37,9, yang menunjukkan bahwasannya angka ini tergolong lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Thailand (35,1), Vietnam (36,8), dan India (35,7), yang menggambarkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi.

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia. Namun, tingginya tingkat kepadatan tersebut tidak selalu berdampak baik, hal ini juga menjadi boomerang sebab dengan tingginya tingkat kepadatan tersebut dapat berimbas kepada tingginya tingkat kemiskinan. Dapat dilihat dari ketiga provinsi "Jawa" yang berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi untuk penduduk miskin. Salah satu penyebab masih eksisnya masalah kemiskinan apabila merujuk pada paradigma demokrasi sosial adalah dikarenakan lemahnya partisipasi sosial masyarakat miskin. Baker, Dubois, & Miley (1992) menyatakan bahwa demokrasi sosial merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi baik diri sendiri maupun keluarga, serta mampu berkontribusi secara positif di masyarakat. Paradigma ini memandang masyarakat miskin bukan sebagai objek pasif yang harus dipenuhi kebutuhannya, namun sebagai subjek yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah kemiskinannya. Dengan demikian, penyelesaian masalah yang ideal dilakukan adalah dengan pendekatan partisipatif. Dalam kaitannya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah

berupaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi maupun menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu cara yang untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melahirkan kebijakan yang sesuai dengan realita di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan berbasis bukti atau dapat disebut dengan *Evidence Based Policy* (EBP). Kebijakan ini merupakan proses penyusunan kebijakan didasarkan pada fakta dan realita yang terjadi di masyarakat, sehingga kebijakan dapat disusun dan diciptakan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan dari publik (Cookson, 2005 dalam Haniyuhana, A & Widiyarta, A (2023)).

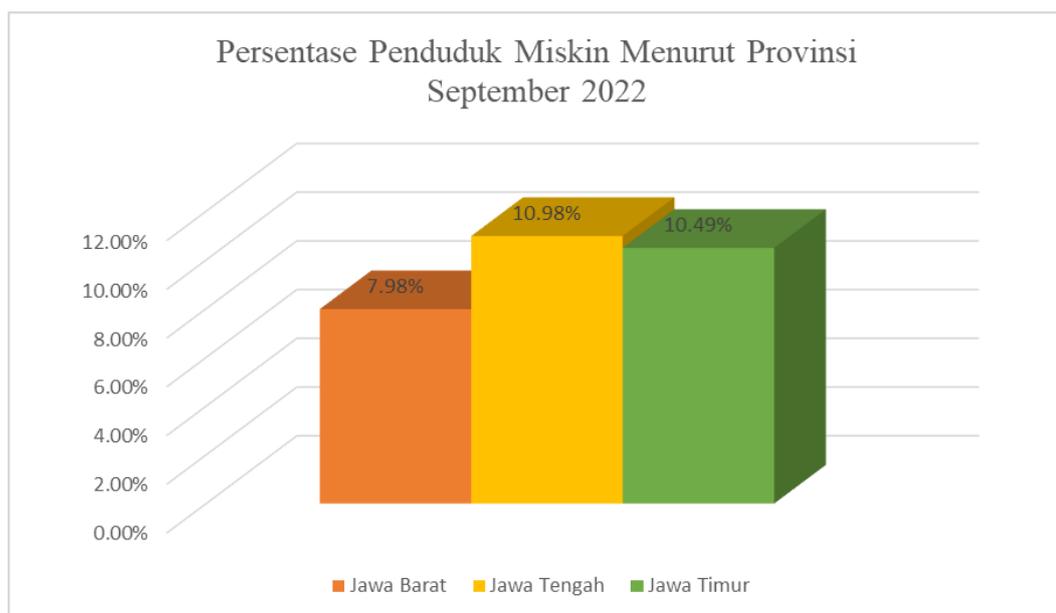


Diagram 1 . Data Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (September 2022)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Penggunaan bukti dalam *Evidence Based Policy* ini kemudian sangat penting untuk dilakukan seiring tingginya kompleksitas atas perubahan sosial masyarakat yang cenderung cepat berubah dan berkembang secara dinamis. Kebijakan ini memanfaatkan hasil penelitian dan informasi yang terbaik dan valid mengenai program yang kemudian digunakan dalam pembuatan keputusan pada seluruh tahapan kebijakan (Hernawan et al., 2022). Selain itu, pengambilan bukti dalam kebijakan berbasis bukti salah satunya bisa didapatkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini terdapat interaksi antara masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan yang mana forum ini dimaksudkan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat mengenai permasalahan sosial yang dirasakan. Dengan maksud,

forum ini menjadi jembatan antara realita sosial dengan kebijakan yang akan dibuat sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui terkait bagaimana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat menjadi bentuk optimalisasi Evidence Based Policy (EBP) dalam penurunan kemiskinan di Jawa Tengah?

Metode

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan *literatur review* dengan memanfaatkan data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian yang berupa artikel jurnal, buku, berita, dan website atau laman pemerintah. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, klasifikasi data, interpretasi isi data dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), setelah itu ditarik kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Daerah dalam Musrenbang perlu melaksanakannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tahapan yang harus ada di setiap lingkup wilayah tersebut dimulai dari tahap perencanaan, kemudian dilakukan tahap pelaksanaan, dan diakhiri oleh tahap evaluasi. Untuk daerah Jawa Tengah, adapun contoh tahapantahapan yang ditempuh dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menurut (JatengProv, 2019) yakni sebagai berikut:

1. Pembukaan Masa Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
2. Pra Forum SKPD;
3. Forum SKPD;
4. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil);
5. Rembugan Bareng Gubernur di 6 (enam) eks Karesidenan sebagai rangkaian Musrenbangwil;
6. Pra Musrenbangprov;
7. Musrenbang Provinsi;
8. Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif

Dalam keberjalanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa hal yang dibahas didalamnya yakni meliputi daftar prioritas masalah pada satuan wilayah. Pengidentifikasian masalah prioritas pada satuan wilayah menjadi hal yang penting, sebab

berangkat dari adanya masalah-masalah tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pencarian solusi melalui program-program maupun kebijakan yang akan direncanakan. Selanjutnya daftar masalah tersebut dituangkan pada uraian kegiatan prioritas yang sekiranya dirasa dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam Musrenbang juga dibahas mengenai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan pada satuan wilayah pada tahun sebelumnya. Evaluasi merupakan suatu bagian penting pada proses pembangunan, sebab dari evaluasi akan didapatkan apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan masyarakat dan dari evaluasi bisa pula didapatkan mengenai pembelajaran atas kesalahan yang kemudian akan menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kedepannya. Pembangunan bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipungkiri hampir selalu menjadi fokus utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap hirarki pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga nasional. Pembahasan pada bidang ekonomi secara umum berupaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang tergolong miskin dari berbagai sudut pandang dan dimensi. Persoalan kemiskinan sebagian besar masih menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta pengelolaan data dan sasaran terkait penanggulangan kemiskinan. Hal-hal tersebut dianggap krusial sehingga mendapat banyak perhatian pada proses Musrenbang, baik dari pemerintah selaku stakeholder dengan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dari masyarakat sendiri yang sadar akan kondisi yang dialaminya. Kondisi ini yang memicu pertemuan pola perencanaan *topdown* dan *bottom-up* dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Musrenbang dijadikan sebagai proses sinkronisasi melalui rekonsiliasi antara kepentingan dan kebutuhan kedua pihak, pemerintah dan masyarakat.

Apabila ditelaah lebih mendalam, ada banyak sekali macam isu dan rencana pembangunan di bidang ekonomi. Berdasarkan peninjauan yang kami lakukan berdasarkan SE Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jawa Tengah Tahun 2017 sampai dengan 2023, fokus topik bidang ekonomi pada Musrenbang di provinsi Jawa Tengah antara lain;

1. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Pembahasan ini berfokus pada penyediaan layanan kebutuhan dasar seperti adanya layanan air bersih, akses rumah laak, Kesehatan, pendidikan, sanitasi, layanan air bersih, serta perlindungan sosial.

Mendukung ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable livelihood*) melalui pemberdayaan usaha dan kapasitas ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat miskin, serta pengurangan angka pengangguran. Disisi lain, juga berfokus pada

penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui sinkronisasi dan validasi data sasaran intervensi.

2. Penguatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha berbasis kerakyatan.
Isu ini berfokus pada peningkatan produktivitas yang kemudian data meningkatkan daya saing dari UMKM dan Koperasi, akses pendampingan manajemen dan usaha, revitalisasi pasar tradisional, perluasan akses informasi dan marketplace melalui digitalisasi. Selain itu, dilakukan pembagian dan pengembangan klaster industri untuk meningkatkan fokus pembangunan, pemudahan perizinan serta disesuaikan dengan potensi, citra, dan promosi masing-masing wilayah.
Pengembangan klaster dilakukan dengan pengembangan potensi dan pariwisata lokal, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
3. Percepatan peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia.
Topik ini berkaitan dengan perbaikan akses dan kualitas pendidikan secara menyeluruh, meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan monitoring dana pendidikan, peningkatan intensitas internalisasi budaya literasi, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, dilakukan pula penyediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, serta peningkatan manajemen dan profesionalitas fasilitas kesehatan. Disisi lain, isu kesejahteraan sosial juga perlu menjadi perhatian serius, melalui penyediaan sarana dan prasarana jaminan sosial (*social safety net*), dan jaminan hari tua.
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi.
Penguatan ketahanan pangan didukung melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan. Optimalisasi potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, serta pembuatan wilayah *food estate* dengan tetap memperhatikan keberlanjutan hutan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, dilakukan melalui permudahan perizinan, mempertahankan luasan lahan, peningkatan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis teknologi. Selain itu, aspek pengelolaan menjadi kunci dalam pengembangan aksesibilitas, ketersediaan, dan stabilitas harga pangan.
5. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan kemandirian fiskal.
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui upaya transparansi, keterbukaan informasi, dan mendorong partisipasi publik. penguatan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen pemerintahan, perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional, memelihara kondusifitas dan koordinasi pembangunan antar daerah, serta pemantapan kapasitas fiskal

melalui optimalisasi dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi pemanfaatan dan transfer, serta penguatan peran BUMD.

Musrenbang yang dalam pelaksanaannya dirancang untuk mengedepankan partisipasi masyarakat untuk membuat suatu kebijakan dalam membangun suatu wilayah, jelas menunjukkan bahwa menjadi salah satu cara mencari “bukti” yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti. Masyarakat sebagai unsur paling nyata dalam mengenal wilayah tempat mereka tinggal kemudian menjadikan mereka sebagai subjek yang paling tepat untuk terjun dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada di masyarakat maupun wilayah yang dimaksud. Oleh karena itu, Musrenbang menjadi sarana yang diharapkan dapat mewujudkan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif atau solusi untuk mengurangi bahkan menyelesaikan masalah, kemudian dari hal tersebut dapat diupayakan untuk mengatasi masalah, dan juga Musrenbang diharapkan dapat menjadi sarana dalam melibatkan masyarakat untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi (Wirawan et al., 2015 dalam Basri, et al., 2022). Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Yunas (2017) bahwa Musrenbang menjadi sebuah perwujudan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan melalui pendekatan *top down* dan *bottom up* yang menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif Musrenbang sebagai kebijakan yang berlandaskan asas partisipatif ini pun sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penekanan pada asas partisipatif dalam Musrenbang ini menjadi penting sebab adanya keikutsertaan dari masyarakat secara langsung tersebut dapat mencerminkan bagaimana realita yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga program dan kebijakan yang direncanakan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Musrenbang kemudian dapat disebut sebagai sarana realisasi *evidence based policy* sebab pada akhirnya Musrenbang mengantarkan pemerintah untuk memproses kebijakan berdasarkan fakta yang ada dari partisipasi masyarakat. Dalam hal ekonomi, Musrenbang di Jawa Tengah dalam portal berita Jawa Tengah melakukan peranannya agar dapat mempercepat pengentasan kemiskinan serta pengangguran yang dilaksanakan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan. Keseriusan itu pun disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah saat Pembukaan Masa Musrenbang 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023. Hal itu diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin kota maupun desa serta penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin. (JatengProv, 2022)

Pentingnya Musrenbang dalam hal ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan kemudian juga dapat ditinjau dari pangkal masalah tingginya angka kemiskinan tersebut. Dalam penanggulangan kemiskinan, salah satu penyebab atau masalah klasik yang sering ditemui adalah instansi pemerintah baik daerah maupun pusat yang masih sibuk menghimpun data menurut kriteria yang dibuat sendiri sehingga seperti mengabaikan data yang sudah tersedia. Hal itu juga menimbulkan belum terciptanya satu data kemiskinan yang bisa digunakan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Instansi pemerintah di daerah maupun pusat cenderung masih sibuk mengumpulkan data sesuai dengan kriteria yang dibuat sendiri sehingga terkesan mengabaikan data yang sudah tersedia. Melihat masalah tersebut, pada dasarnya penanggulangan penanggulangan kemiskinan membutuhkan "satu data dalam satu pintu". Jika dikaitkan dengan Musrenbang, kegiatan musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana memperoleh berbagai data salah satunya data kemiskinan untuk memilih sasaran atau masyarakat yang layak untuk mendapat manfaat program pelatihan kerja, kewirausahaan dan padat karya. (Irmayani dan Suradi, 2018). Berangkat dari hal tersebut, dapat dilihat secara jelas bahwasannya Musrenbang merupakan salah satu cara dalam mendapatkan "bukti" yang dapat berbentuk data-data maupun daftar permasalahan di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti atau *Evidence Based Policy* (EBP).

Simpulan

Musrenbang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan buktibukti konkrit di masyarakat yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti atau Evidence Based Policy (EBP). Dengan kata lain, Musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam membangun suatu lingkup wilayah baik membuat maupun melaksanakan kebijakan telah menjadi bukti konkrit adanya usaha dari pemerintah untuk dapat menghasilkan kebijakan yang berlandaskan bukti atau kenyataan yang ada. Dalam tingkat lanjutnya, pemerintah pun menjadikan musrenbang sebagai dasar pembangunan dari berbagai aspek salah satunya ekonomi. Permasalahan ekonomi yang tidak pernah jauh dari pengentasan kemiskinan mendorong Musrenbang menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kebijakan yang representatif dan nantinya dalam jangka waktu yang panjang juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan pengurangan angka kemiskinan yang dimaksud. Di Jawa Tengah, Musrenbang ini telah diupayakan agar dapat menjadi agenda yang dapat menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar serta penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah dapat meningkatkan dan memaksimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Indonesia khususnya di Jawa Tengah mengingat Musrenbang dapat menghasilkan bukti-bukti konkrit terkait realitas yang terjadi di masyarakat yang kemudian dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijakan yang representatif agar tujuan-tujuan seperti menurunnya angka kemiskinan dapat tercapai dengan memperlihatkan hasil yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan, Budi, H., Teniro, A., Subhan, Efendi, M., Surya, A.,. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13 (1), p 25-32.
- Bappenas. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 -2018. *Bappenas Working Paper*, 5(1), 97-119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>
- BPS. (2021). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diakses 30 Juni 2023, dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html>
- BPS. (2023). *Gini Ratio September 2022 tercatat sebesar 0,381*. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2034/giniratio-september-2022-tercatatsebesar-0-381.html>
- BPS. (2023). Statistik Indonesia 2023. BPS.Go.Id. https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f_03580a614b/statistikindonesia-2023.html
- Dubois, B., & Miley, K. K. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Allyn and Bacon.
- European Parliamentary Research Service (EPRS). (2021). Evidence for policy-making Foresight-based scientific advice. *Briefing Paper Think Tank European Parlemen*, 1(1), 1-8.
- Haniyuhana, A., & Widiyarta, A. (2023). Penerapan *Evidence Based Policy* Dalam Implementasi Program Smart Village. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14(1), p 56-62.
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Purnomo, A, M., Aprliani, A. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal GOVERNANSI*, Vol 8 (1), p 1-10.
- Irmayani dan Suradi. (2018). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang. *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol 8(1), p 1-13.
- JatengProv. (2022). Musrenbang 2022 dan RKPD 2023, Ini Prioritas Pemprov Jateng. <https://jatengprov.go.id/publik/Musrenbang-2022-dan-rkpd2023-ini-prioritas-pemprovjateng/>
- JatengProv. (2019). Musrenbang Dibuka, Masyarakat Bisa Usul Langsung ke Provinsi. <https://jatengprov.go.id/publik/Musrenbang-dibukamasyarakat-bisa-usullangsung-ke-provins>
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Retrieved Juni 30, 2023, from <https://www.ksiindonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-AnalisisKebijakan.pdf>

-
- Miranti, R. (2013). Provincial Poverty Rates in Indonesia, 2006-2011. *Report prepared for the TNP2K, Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI), USAID.*
- Prakarsa. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015– 2018. Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129 <https://doi.org/10.22146/jmpk.v8i03.2927>
- World Bank. (2022). *Understanding Poverty*. Diakses 30 Juni 2023, dari <https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty>
- World Bank. (2023). *Gini index*. World Bank Data. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>
- Yunas, N.S. (2017). Efektivitas EMusrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 7(1), p 19-27.